



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2005

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005, maka Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2004, sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~~3685~~) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 68);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005 ;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 86);
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak.
5. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya.
6. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan warna dasar plat kuning, serta huruf dan angka hitam.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
8. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah Tahun perakitan Kendaraan Bermotor.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
11. Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya.
12. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanent.

13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain Perusahaan Pemegang Merk, Asosiasi Penjual Kendaraan Bermotor.
14. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

Dasar pengenaan PKB adalah perkalian dari dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor, yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Untuk Kendaraan Bermotor yang Nilai Jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, Nilai Jualnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Tahun Pembuatan terbaru, Nilai Jualnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) di bawah HPU yang berlaku di Daerah ;
 - b. untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, Nilai Jualnya ditetapkan dengan membandingkan Merk, Jenis, Type, Isi Cylinder dan Tahun Pembuatan dari Negara produsen yang sama ;
 - c. Nilai Jual untuk Tahun Pembuatan terbaru dan tidak diketahui Harga Pasaran Umumnya, maka besarnya Nilai Jual dihitung dengan penambahan 5 % (lima persen) untuk Roda 4 atau lebih dan 2,5 % (dua koma lima persen) untuk Roda 2 dan Roda 3 dari Nilai Jual Tahun sebelumnya ;
 - d. apabila Nilai Jual untuk Tahun Pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan ini, Nilai Jualnya ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Tahun Pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini dengan penurunan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan HPU di Daerah.

- (2) Jenis, Merek dan Type yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan untuk tahun pembuatan terbaru, Nilai Jualnya ditetapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) dari Nilai Jual tahun sebelumnya untuk Roda 4 atau lebih dan 2,5 % (dua koma lima persen), untuk Roda 2 dan Roda 3, atau disesuaikan dengan HPU di Daerah.
- (3) Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. tekanan gandar ;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor ;
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor, Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon dan sejenisnya sebesar 1,00 ;
 - b. Mobil Barang / Beban sebesar 1,30 ;
 - c. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebesar 1,00.
- (3) Besaran Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor rubah bentuk (Box/Delivery Van, Tractor Head/ Trailer, Tangki, Tronton/Tandem/Logging, Dump Truck, Station Wagon/Minibus, Micro Bus, Bus, Double Cabin, Mixer, Derek/Crane, Preezer Container) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I ditambah dengan Nilai Jual Rubah Bentuk ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan bermotor yang mengalami Ganti Mesin baru atau lama, Nilai Jualnya ditambah dengan Harga Mesin dan Harga Mesin ditetapkan paling rendah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kendaraan Bermotor yang mengalami Perubahan Bentuk setelah pendaftaran dan mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut tambahan pembayaran BBN-KB sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengalami Perubahan Bentuk dipungut tambahan BBN-KB sebesar 10 % (sepuluh persen) dari selisih Nilai Jual sebelum dan sesudah rubah bentuk, apabila tidak diketahui, selisih Nilai Jual ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin setelah pendaftaran dipungut tambahan BBN-KB sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga mesin, dan apabila Harga Mesin tidak diketahui, harga mesin ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 8

Untuk meringankan beban masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor diberikan keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga kewajibannya ditetapkan sebesar :

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| a. Sedan, Sedan Station | 100 % |
| b. Kendaraan Bermotor Umum | 85 % |
| c. Sepeda Motor | 90 % |
| d. Kendaraan Bermotor lainnya | 90 % |

Pasal 9

PKB Kereta Gandeng ditetapkan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kecuali apabila PKB Kendaraan Bermotor penariknya lebih rendah dari Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), maka PKB Kereta Gandengnya ditetapkan sebesar PKB Kendaraan Bermotor penariknya.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini setiap bulan sekali kepada Gubernur.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 33

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR
 TAHUN : 2005

JENIS : SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 3

NO	KODING	MERЕК	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	702034 00313	BAJAJ	AUTORICKSHAW (RODA 3)	2002	15,200,000	1.0	15,200,000
2	702034 00313	BAJAJ	AUTORICKSHAW (RODA 3)	2003	15,600,000	1.0	15,600,000
3	702034 00313	BAJAJ	AUTORICKSHAW (RODA 3)	2004	16,000,000	1.0	16,000,000
4	702034 00913	BAJAJ	DELEVERY VAN (RODA 3)	2002	16,600,000	1.0	16,600,000
5	702034 00913	BAJAJ	DELEVERY VAN (RODA 3)	2003	17,100,000	1.0	17,100,000
6	702034 00913	BAJAJ	DELEVERY VAN (RODA 3)	2004	17,500,000	1.0	17,500,000
7	702034 01313	BAJAJ	PICK UP VAN (RODA 3)	2002	16,000,000	1.0	16,000,000
8	702034 01313	BAJAJ	PICK UP VAN (RODA 3)	2003	16,400,000	1.0	16,400,000
9	702034 01313	BAJAJ	PICK UP VAN (RODA 3)	2004	16,800,000	1.0	16,800,000
10	702043 01725	BEIJING	RT150-1 (RODA 3)	2004	9,700,000	1.0	9,700,000
11	702043 01825	BEIJING	RT150-2 (RODA 3)	2004	9,700,000	1.0	9,700,000
12	702046 00101	BEMBIЕ	ANGSA (RODA 3)	2000	8,600,000	1.0	8,600,000
13	702046 00101	BEMBIЕ	ANGSA (RODA 3)	2001	9,500,000	1.0	9,500,000
14	702046 00101	BEMBIЕ	ANGSA (RODA 3)	2002	9,800,000	1.0	9,800,000
15	702046 00101	BEMBIЕ	ANGSA (RODA 3)	2003	10,000,000	1.0	10,000,000
16	702123 01025	FUKUDA	FK 100 ZH (RODA 3)	2001	6,300,000	1.0	6,300,000
17	702123 01025	FUKUDA	FK 100 ZH (RODA 3)	2002	6,600,000	1.0	6,600,000
18	702123 01025	FUKUDA	FK 100 ZH (RODA 3)	2003	6,800,000	1.0	6,800,000
19	702123 01025	FUKUDA	FK 100 ZH (RODA 3)	2004	7,000,000	1.0	7,000,000
20	702126 02401	GARUDA	BEJO (RODA 3)	2004	13,000,000	1.0	13,000,000
21	702205 00625	KAISAR	KAISAR TRISEDA (RODA 3)	2004	8,400,000	1.0	8,400,000
22	702205 00725	KAISAR	TRISEDA (RODA 3)	2004	8,400,000	1.0	8,400,000
23	702208 00201	KANCIL	KANCIL (RODA 3)	2003	27,000,000	1.0	27,000,000
24	702208 00201	KANCIL	KANCIL (RODA 3)	2004	28,000,000	1.0	28,000,000
25	702208 00201	KANCIL	KANCIL (RODA 3)	2005	29,000,000	1.0	29,000,000
26	702218 00725	KOKOHFU	*LX 150 ZH-2 (RODA 3)	2004	9,700,000	1.0	9,700,000
27	702223 00225	KUTAMA	7YP-150 (RODA 3)	2003	6,800,000	1.0	6,800,000
28	702223 00225	KUTAMA	7YP-150 (RODA 3)	2004	7,000,000	1.0	7,000,000
29	702235 00825	LONCIN	LX 150 (RODA 3)	2004	9,700,000	1.0	9,700,000
30	702280 03125	NASHA	NSR 310 A / 100cc (RODA 3)	2004	7,000,000	1.0	7,000,000
31	702280 03225	NASHA	NSR 315 A / 150cc (RODA 3)	2004	9,700,000	1.0	9,700,000
32	702301 01030	PIAGGIO	DELIVERY VAN (RODA 3)	2003	17,100,000	1.0	17,100,000
33	702301 01030	PIAGGIO	DELIVERY VAN (RODA 3)	2004	17,500,000	1.0	17,500,000
34	702301 01130	PIAGGIO	PICK UP VAN (RODA 3)	2003	16,400,000	1.0	16,400,000
35	702301 01130	PIAGGIO	PICK UP VAN (RODA 3)	2004	16,800,000	1.0	16,800,000
36	702327 03625	SANEX	SR-3 (RODA 3)	2004	9,700,000	1.0	9,700,000
37	702340 01025	SHIFENG	7 Y - 750 (RODA 3)	2001	20,700,000	1.0	20,700,000
38	702368 00725	TAJIMA	320 CP 260 (RODA 3)	2001	6,300,000	1.0	6,300,000
39	702368 00725	TAJIMA	320 CP 260 (RODA 3)	2002	6,600,000	1.0	6,600,000
40	702368 00725	TAJIMA	320 CP 260 (RODA 3)	2003	6,800,000	1.0	6,800,000
41	702368 00725	TAJIMA	320 CP 260 (RODA 3)	2004	7,000,000	1.0	7,000,000
42	702379 04925	TOSSA	HERCULES TSZ 150-2 (RODA 3)	2001	9,000,000	1.0	9,000,000
43	702379 04925	TOSSA	HERCULES TSZ 150-2 (RODA 3)	2002	9,200,000	1.0	9,200,000
44	702379 04925	TOSSA	HERCULES TSZ 150-2 (RODA 3)	2003	9,400,000	1.0	9,400,000
45	702379 04925	TOSSA	HERCULES TSZ 150-2 (RODA 3)	2004	9,500,000	1.0	9,500,000
46	702379 04925	TOSSA	HERCULES TSZ 150-2 (RODA 3)	2005	9,700,000	1.0	9,700,000
47	702379 05025	TOSSA	SAMSON TSZ 100-1 (RODA 3)	2000	4,900,000	1.0	4,900,000
48	702379 05025	TOSSA	SAMSON TSZ 100-1 (RODA 3)	2001	5,100,000	1.0	5,100,000
49	702379 05025	TOSSA	SAMSON TSZ 100-1 (RODA 3)	2002	6,600,000	1.0	6,600,000
50	702379 05025	TOSSA	SAMSON TSZ 100-1 (RODA 3)	2003	6,800,000	1.0	6,800,000
51	702379 05025	TOSSA	SAMSON TSZ 100-1 (RODA 3)	2004	7,000,000	1.0	7,000,000
52	702379 05125	TOSSA	SUPER HERCULES TSZ 200-2	2005	9,700,000	1.0	9,700,000
53	702399 00325	VIVAMAS	NEW SAMSON (RODA 3)	2002	6,600,000	1.0	6,600,000
54	702399 00325	VIVAMAS	NEW SAMSON (RODA 3)	2003	6,800,000	1.0	6,800,000
55	702399 00325	VIVAMAS	NEW SAMSON (RODA 3)	2004	6,900,000	1.0	6,900,000
56	702399 00325	VIVAMAS	NEW SAMSON (RODA 3)	2005	7,000,000	1.0	7,000,000
57	702399 00425	VIVAMAS	SAMSON (RODA 3)	2001	6,300,000	1.0	6,300,000
58	702399 00425	VIVAMAS	SAMSON (RODA 3)	2002	6,600,000	1.0	6,600,000
59	702399 00425	VIVAMAS	SAMSON (RODA 3)	2003	6,800,000	1.0	6,800,000
60	702399 00425	VIVAMAS	SAMSON (RODA 3)	2004	6,900,000	1.0	6,900,000
61	702399 00425	VIVAMAS	SAMSON (RODA 3)	2005	7,000,000	1.0	7,000,000
62	702399 00525	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2003	9,500,000	1.0	9,500,000
63	702399 00525	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2004	9,600,000	1.0	9,600,000
64	702399 00525	VIVAMAS	SAMSON LAKSANA (RODA 3)	2005	9,700,000	1.0	9,700,000
65	702399 00625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2003	9,500,000	1.0	9,500,000
66	702399 00625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2004	9,600,000	1.0	9,600,000
67	702399 00625	VIVAMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2005	9,700,000	1.0	9,700,000

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO